

PENGARUH PAD, DAU, DBH TERHADAP BELANJA MODAL YANG DIMODERASI OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI

Rafly Aditia Fikri
raflycell1002@gmail.com
Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local own-Source Revenue, General Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on Capital Expenditure: which were moderated by Economic Growth in the district/city of East Java Province in the budget periods of 2017-2021. The research was quantitative with secondary data, in from of Realization Report of Regional Revenue and Expenditure Budget. The data had been taken from Audit Board of the Representatives of East Java Province and table of economic growth of website jatim.go.id. furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 170 samples from 34 districts/cities consisting of 27 districts and 7 cities. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Package for the School Science) 26. The result showed that Local own-Source Revenue did not affect Capital Expenditure. However, General Allocation Fund had a negative effect on Capital Expenditure. Additionally, Profit Sharing Fund partially had a positive effect on Capital Expenditure. In contrast, economic growth was able to moderate the effect of Local own-Source Revenue, General Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on Capital Expenditure.

Keywords: local own sources, profit sharing fund, general allocation fund, capital expenditure, economic growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta tabel laju pertumbuhan ekonomi yang berasal dari website jatim.go.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 34 Kabupaten/Kota yang terdiri atas 27 kabupaten dan 7 kota dengan jumlah data sampel sebanyak 170. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dengan menggunakan program Statistical Package for the School Science (SPSS) versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, namun Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Pengaruh Pendatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, belanja modal, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia, dikukuhkan oleh Pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan yang akhirnya mengalami pembaruan Kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai Desentralisasi adalah Pelimpahan urusan pemerintah oleh Pemerintah Pusat, kepada Daerah

Otonom berdasarkan Asas Otonomi. Melalui kebijakan Pemerintah Otonomi Daerah Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam membenahi sendiri hal yang mencakup pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Hubungan otonomi daerah dan desentralisasi, menjadikan Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam mengurus kepentingannya dan mendorong untuk memiliki daya saing atas pencapaian yang dimiliki daerah.

Seiring berjalannya pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan kemampuannya dalam mencari sumber pendapatan baru dengan menyesuaikan kekayaan daerah yang dimiliki, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari daerah tersebut, Pemerintah Pusat juga masih tetap memberikan dana transfer ke Daerah sebagai bentuk dukungan atas penyelenggaraan urusan daerah dengan adanya penyaluran Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana transfer tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prabawati dan Wany (2017) menyebutkan Pemerintah dapat dibilang mempunyai kinerja yang baik apabila mampu memperoleh penghasilan yang melebihi jumlah yang diselenggarakan (*favourable variance*). Selain PAD dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 DAU adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN, kemudian ditransfer ke Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah sebagai upaya dalam hal membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dikutip dari Laman Resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja Modal adalah belanja yang diterima oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat lebih dari tahun anggaran untuk meningkatkan kekayaan atau kemakmuran daerah kemudian menambahkan belanja rutin pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2011 dalam Yulianto dan Arza, 2021). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan untuk membangun fasilitas publik dalam hal pelayanan yang berkualitas (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Selain itu, Rinaldi (2017:51) mengungkapkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dengan peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan dana dari pemerintah yang disalurkan kepada daerah tersebut akan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik juga diwilayah suatu daerah. Mochlas dan Purwati (2019) mengungkapkan mengenai "pengoptimalan Pertumbuhan Ekonomi tidak lepas dari perwujudan otonomi daerah karena peranannya adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola, mengembangkan, dan menggali apa yang dimiliki masing-masing daerah.

Dengan adanya pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: (1)Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur?, (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur?, (3) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur?, (4) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa

Timur?, (5) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur?, (6) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur?, (7) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur?. Sedangkan tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (2) Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (3) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (4) Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (5) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Jawa Timur, (6) Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Jawa Timur, (7) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Stewardship Theory

Menurut Donilson dan Davis (1997) (dalam Anton, 2019) *Stewardship* menggambarkan bahwa manajemen tidak hanya mementingkan tujuan individu, tetapi juga harus mementingkan hasil utama yaitu untuk kepentingan suatu organisasi. Akuntansi sebagai penggerak informasi keuangan (*driver*) salah satu tugas utamanya menyajikan laporan-laporan periodik dan perkembangan transaksi ke arah yang semakin kompleks, diikuti perkembangan organisasi sektor publik melalui tumbuhnya spesialisasi di bidang akuntansi. Informasi keuangan dapat dilihat dari kemampuan keuangan pemerintah melalui pendanaan Pemerintah Daerah. Keuangan yang dapat dikelola oleh pemerintah sendiri tercermin dari keadaan tingkat otonomi keuangan daerah. Tingkat otonomi keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan pengelolaan daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini dapat tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 menyatakan bahwa APBD adalah Rencana Keuangan Pemerintah Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Kinerja keuangan daerah dianggap berhasil apabila telah mencapai standar yang ditentukan. Kinerja keuangan dapat berjalan dengan baik apabila dilihat berdasarkan seberapa besar pencapaian pemerintah negara dalam mengimplementasikan pembiayaan daerah dengan cara memetakan kekayaan awal daerah melalui kinerja dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan keuangan suatu daerah melalui eksplorasi kekayaan asli daerah.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berhak membuat kebijakan untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan berbagai hal dalam pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan peran dalam mewujudkan pencapaian kesejahteraan masyarakat (Prabawati dan Wany, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mentayani dan Rusmanto (2013), menyatakan jika pendapatan daerah memiliki potensi yang tinggi (bukan penepatan dari bantuan), maka tidak menutup kemungkinan daerah akan lebih leluasa mempertimbangkan kepentingan masyarakat di daerah otonomi dalam ruang lingkup APBD yang sangat terikat dengan kepentingan masyarakat di daerah otonomi, dalam APBD sangat terikat dengan Kemandirian dalam PAD. Pendapatan tersebut bersumber dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, (4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah. Dengan dilaksanakannya desentralisasi, maka daerah memiliki kesempatan dalam menggali dan mengelola pendapatannya untuk penyelenggaraan urusan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum terdiri dari (1) Dana Alokasi Umum untuk Provinsi, (2) Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum setiap daerah ditentukan berdasarkan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ketersediaan dana APBN (Mardiasmo, 2002 dalam Astuti, 2021).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang berpotensi dan menjadi salah satu modal utama daerah dalam memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan lagi didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Prabawati dan Wany, 2021). Hutabarat *et al.*, (2021:11) menyatakan DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

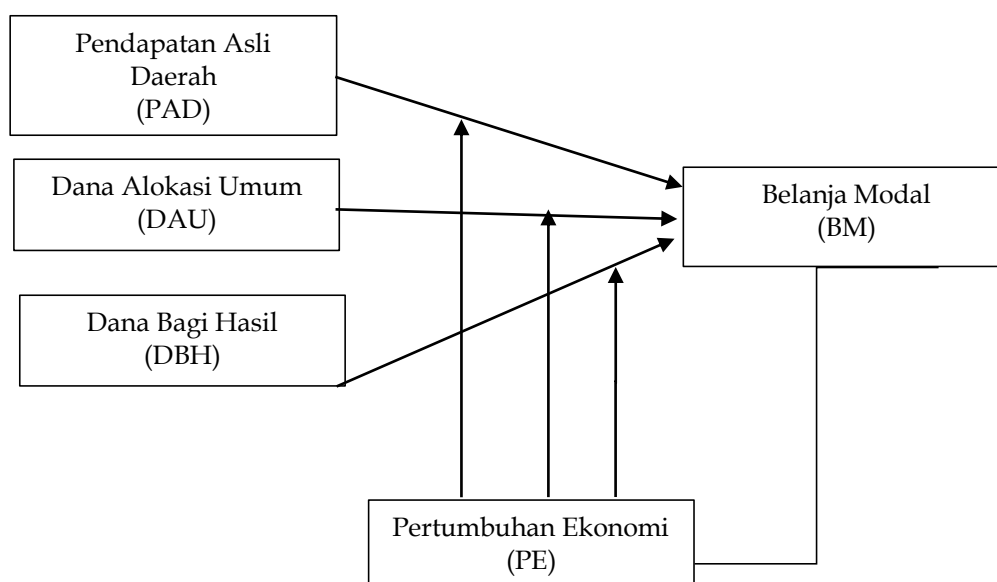
Belanja Modal (BM)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Belanja Modal dikeluarkan dan dipergunakan antara lain: (1) mencakup belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) Belanja modal jalan, (5) irigasi dan jaringan, (6) Belanja modal lainnya serta belanja modal Badan Layanan Umum (BLU).

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter yang sangat berperan dalam hal menganalisis pembangunan ekonomi di suatu negara (Soesilo dan Asyik, 2021). Soekirno (2011:332) menjabarkan bahwa beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) Sumber Daya Alam (SDA), (2) Organisasi, (3) Akumulasi Modal, (4) Kemajuan Teknologi, (5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pemerintah Daerah dianggap berhasil dalam otonomi daerah apabila telah berhasil melaksanakan otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi. Kenaikan PAD diharapkan dapat berpengaruh terhadap belanja modal oleh pemerintah (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Nuzana (2016), Priambudi (2017), Susanti dan Fahlevi (2016), Jaeni dan Anggana (2016), Prabawati dan Wany (2017), Masruroh (2018), Dini (2021), Soesilo dan Asyik (2021) serta Mochlas dan Purwati (2021) menyatakan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan Mahardika (2019), Ayem dan Pratama (2018) menyatakan Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, maka dapat ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Diberikannya Dana Alokasi Umum (DAU) ini diharapkan supaya tidak adanya kesenjangan pendapatan dan keseimbangan perekonomian antar daerah hal ini dikarenakan faktor sumber kekayaan tiap daerah yang berbeda. Daerah yang memiliki kekayaan yang banyak tentu pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan daerah yang sumber kekayaannya sedikit tentu akan sedikit juga pendapatan daerah yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2016), Juniawan dan Suryantini (2018), Mulyati (2022) menyatakan tentang DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini juga dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2015) yang menyatakan DAU juga berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2019); Ayem dan Pratama (2018) dan Damanik (2021) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

DBH diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan secara keseluruhan baik dari segi sarana dan prasarana atau pelayanan publik, karena DBH merupakan salah satu dana yang digunakan untuk belanja daerah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan daerah untuk mendukung pembangunan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2021), Soekirno (2011:332), Mulyati (2022), Maryadi (2014), Susanti dan Fahlevi (2016), Jannah *et al.* (2017) Santoso *et al* (2021), serta Prasetyo dan Rusdi (2021) menyatakan hasil bahwa Dana Bagi Hasil memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Peningkatan PE dapat memberikan peluang bagi daerah yang calon investornya ingin berinvestasi pada daerah tersebut sehingga berdampak pada PAD yang akan meningkat nantinya. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2013), Masruroh (2018), Ayem dan Pratama (2018), serta Sari dan Hermanto (2018) memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2010), memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditentukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran pengelolaan yang baik atas belanja modal dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh daerah. Dengan menunjangnya sarana dan prasarana publik diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang baik akan menarik calon investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi mampu menjadi penentu hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014), Sugiardi dan Supadmi (2014), Jaeni dan Anggana (2016), Masruroh (2018), Mahardika dan Riharjo (2019), serta Soesilo dan Asyik (2021) memberikan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah digunakan untuk biaya pembangunan daerah, karena kondisi Sumber Daya Alam (SDA) yang berbeda antar tiap daerah maka yang terjadi adalah daerah yang memiliki sumber daya yang tinggi akan semakin tinggi begitupun sebaliknya dengan daerah yang memiliki sumber yang rendah akan tertinggal. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antar daerah Penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014), Hidayati (2016), Pratama (2018), Salama (2018) Menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal.

H₆: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

DBH akan dialokasikan untuk belanja daerah dengan tujuan meningkatkan keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah mengingat potensi daerah penghasil sebagai penunjang dalam pembangunan daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan yang baik kepada publik. Sehingga Pertumbuhan Ekonomi mampu menjadi penentu hubungan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Prabawati dan Wany (2017), Salama (2018), serta Cahyaning (2018) memberikan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

H₇: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Sujarweni (2018:12) mengartikan jenis penelitian tersebut dihasilkan dari temuan yang diperoleh berdasarkan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi sebagai pengukuran. Populasi menurut Sugiyono (2017) adalah jumlah seluruh yang berisi objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas yang ditetapkan penulis untuk penelitian yang memberikan kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu adanya kriteria dalam pemilihan sampel agar sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; (2) Kabupaten/Kota yang terdapat keterbatasan publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017-2021. Berdasarkan kriteria tersebut maka penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 29 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 22 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi, dengan mengumpulkan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data tersebut diantaranya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

semua penerimaan anggaran yang diperoleh daerah dari sumber pendapatan yang diperoleh dari pungutan wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut rumus dalam menghitung PAD:

$$PAD = Rddf = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan suatu daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004). Berikut rumus dalam menghitung DAU:

$$\text{DAU} = \frac{\text{Alokasi dasar} + \text{Celah fiskal}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan berdasarkan angka persentase atas pendapatan yang ditransfer kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah". Berikut rumus dalam menghitung DBH:

$$\text{DBH} = \frac{\text{Dana Bagi Hasil Pajak} + \text{Dana Bagi Hasil SDA}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Belanja Modal (BM)

Menurut Halim dan Kusufi (2011:107) menyatakan bahwa Belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan guna menambah atau mempertahankan guna menambah kualitas aset tetap dan lainnya dengan kepemilikan nilai manfaatnya selama lebih dari 12 bulan (lebih dari satu periode akuntansi). Berikut rumus dalam menghitung BM:

$$\text{BM} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Variabel Moderasi (*Moderating Variable*)

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro dalam mengukur kinerja keuangan secara kuantitatif untuk menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah pada tahun tertentu. Perekonomian negara dapat dinyatakan berhasil apabila pendapatan perkapita masyarakat mengalami peningkatan setiap waktunya. Berikut rumus dalam menghitung PE:

$$\text{PE} = \frac{(\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1})}{(\text{PDRBt-1})} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRBt = Pendapatan Domestik Regional Bruto Periode Berjalan.

PDRBt-1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto Periode tahun sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diartikan sebagai analisis data yang menggunakan statistik dengan cara menyajikan hasil berupa deskripsi atau penggambaran data yang telah tersedia dengan mengetahui beberapa informasi yang meliputi nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap variabel residual pada model regresi apakah data yang akan diuji berdistribusi normal atau tidak. Dapat dikatakan baik dan normal apabila hasil uji memenuhi prinsip yang telah ditentukan. Terdiri dari dua metode dalam pengujian ini, yaitu: (1) Grafik (Normal P-Plot), pengujian ini memperhatikan penyebaran titik (data) pada garis diagonal; (2) Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S), pengujian ini berdasarkan uji statistic non-parametik. Berikut merupakan ketentuan dalam pengambilan keputusan: (1) Data dikatakan terdistribusi normal, apabila data menyebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, serta nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang menghasilkan nilai $> 0,05$; (2) Data dikatakan tidak terdistribusi normal, apabila data tidak menyebar pada sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, serta nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang menghasilkan nilai $< 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antara variabel bebas. Gejala multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data dapat dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas, apabila nilai *Tolerance* menunjukkan nilai $> 0,10$ dan nilai VIF yang bernilai < 10 . Sebaliknya, apabila nilai *Tolerance* bernilai $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka data tersebut dinyatakan terdapat adanya gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik apabila terbebas dari gejala autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Runs Test. Dasar pengambilan keputusan atas uji tersebut yaitu apabila Asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$ maka data tersebut menandakan tidak terjadi autokorelasi, sedangkan apabila Asymp. Sig (2-tailed) $< 0,05$ maka data tersebut menandakan terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melakukan pengujian perbedaan variasi residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya (Sujarweni, 2018:189). Data yang baik adalah data yang mengandung homoskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan grafik scatterplot dan uji park. Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan, yaitu: (1) Terindikasi adanya heteroskedastisitas, apabila penyebaran titik-titik data membentuk suatu pola tertentu dan nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ pada uji park; (2) Terbebas dari heteroskedastisitas, apabila titik-titik data menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu dan nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ pada uji park.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melakukan pengujian dan pengukuran atas kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang memaparkan akan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Adapun bentuk persamaan model regresi yang digunakan:

Persamaan model:

$$BM = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DAU + \beta_3DBH + \beta_4PE + \beta_5PAD*PE + \beta_6DAU*PE + \beta_7DBH*PE + e$$

Keterangan:

a	: Konstanta	DAU	: Dana Alokasi Umum
$\beta_1 - \beta_7$: Koefisien Regresi	DBH	: Dana Bagi Hasil
BM	: Belanja Modal	PE	: Pertumbuhan Ekonomi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah	e	: Standar Error

Uji Koefisien Determinan(R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar dari berbagai kemampuan model dalam memberikan keterangan mengenai variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:97). Nilai pada R^2 yang dimiliki terletak pada 0-1. Apabila diketahui nilai R^2 yang kecil, menandakan kemampuan dari variabel bebas tersebut dalam menggambarkan variabel terikat terdapat keterbatasan. Sedangkan, apabila nilai R^2 mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa variabel bebas dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi pada variasi variabel terikat.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut layak digunakan atau tidak dalam penelitian dengan melihat tingkat signifikan 0,05 yang mana seluruh variabel bebas dimasukkan dalam model secara bersamaan terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengujian ini, adalah: (1) Data dinyatakan layak, apabila nilai signifikan < 0,05; (2) Data dinyatakan tidak layak, apabila nilai signifikan > 0,05.

Uji Parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk menggambarkan seberapa jauh pengaruh antar variabel satu dengan lainnya secara masing-masing dalam menerangkan variabel terikat. Pengujian ini dapat diketahui berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Nilai signifikan < 0,05 menandakan hasil uji menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan; (2) Nilai signifikan > 0,05 menandakan hasil uji menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut merupakan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standart Deviation
PAD	170	,07	,65	0,193	,1094
DAU	170	,14	1,13	0,446	,1234
DBH	170	,00	,53	0,070	,0687
PE	170	-,89	,69	0,050	,1017
PAD*PE	170	-,17	,10	0,010	,0197
DAU*PE	170	-,40	,34	0,022	,0461
DBH*PE	170	-,04	,10	0,004	,0108
Valid N (listwise)	170				

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa besarnya data sampel (N) yang digunakan dalam pengujian adalah 170 data. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai terendah 0,07 dan nilai tertinggi 0,65 dengan nilai rata-rata 0,193 dan standar deviasi sebesar 0,1094. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai terendah 0,14 dan nilai tertinggi 1,13 dengan nilai rata-rata 0,446 dan standar deviasi sebesar 0,1234. Dana

Bagi Hasil (DHB) memiliki nilai terendah 0,00 dan nilai tertinggi 0,53 dengan nilai rata-rata 0,070 dan standar deviasi 0,0687. Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai terendah -0,89 dan nilai tertinggi 0,69 dengan nilai rata-rata 0,050 dan standar deviasi sebesar 0,1017. PAD*PE memiliki nilai terendah -0,17 dan nilai tertinggi 0,10 dengan nilai rata-rata 0,010 dan standar deviasi sebesar 0,0197. DAU*PE memiliki nilai terendah -0,40 dan nilai tertinggi 0,34 dengan nilai rata-rata sebesar 0,022 dan standar deviasi sebesar 0,0461. Serta DBH*PE memiliki nilai terendah -0,04 dan nilai tertinggi 0,10 dengan nilai rata-rata sebesar 0,004 dan standar deviasi sebesar 0,0108.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-smirnov* (KS) digunakan dalam penelitian ini karena data penelitian (N) sebanyak 170. Pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov* memperoleh nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,200 yang berarti dikatakan telah berdistribusi normal. Berdasarkan grafik normal *probability* diperoleh bahwa titik-titik yang tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pada bagian *coefficients* diperoleh hasil nilai Tolerance dan VIF dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,467 dan 2,142. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai sebesar 0,674 dan 1,483. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai sebesar 0,480 dan 2,331. (PAD*PE) memiliki nilai sebesar 0,650 dan 5,650. (DAU*PE) memiliki nilai sebesar 0,874 dan 6,743. Serta (DBH*PE) memiliki nilai sebesar 0,358 dan 5,725. Dari hasil masing-masing variabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas, dikarenakan telah memenuhi ketentuan yaitu nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF <10.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,090, yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05 ($0,090 > 0,05$). Maka, dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas yang menunjukkan hasil uji park signifikan yaitu (PAD) memiliki nilai sebesar 0,875. (DAU) memiliki nilai sebesar 0,310. (DBH) memiliki nilai sebesar 0,186. (PE) memiliki nilai sebesar 0,248. PAD*PE memiliki nilai sebesar 0,399. DAU*PE memiliki nilai sebesar 0,297. Serta DBH*PE memiliki nilai sebesar 0,959. Dari hasil masing-masing variabel tersebut, memiliki nilai lebih besar dari 0,05 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dalam grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak pada posisi penyebaran diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y dan tidak berkumpul membentuk sebuah pola tertentu sehingga tidak teridentifikasi terjadinya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan regresi linear berganda yang diperoleh dari hasil output, terlihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,235	a,026		9,184	,000
PAD	-,087	,056	-,166	-1,570	,118
DAU	-,114	,041	-,243	-2,769	,006
DBH	,127	,089	,151	1,427	,032
PE	,253	,623	,445	,406	,022
PAD*PE	1,256	,971	,430	1,294	,019
DAU*PE	,267	1,026	,214	,260	,012
DBH*PE	,236	,918	,044	,257	,030

a. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2, maka didapatkan persamaan model regresi linear berganda, sebagai berikut :

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_1 DBH + \beta_4 PE + \beta_5 PAD*PE + \beta_6 DAU*PE + \beta_7 DBH*PE + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berikut nilai uji koefisien determinasi R² yang diperoleh dari hasil output SPSS dalam tabel 3, sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,396 ^a	,157	,120	,0540

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DBH, PE, PAD*PE, DAU*PE, DBH*PE

b. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan nilai R Square sebesar 0,157. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh sebesar 15,7% yang berasal dari variabel bebas dan terikat yakni: PAD, DAU, DBH, PE, PAD*PE, DAU*PE, DBH*PE. Sedangkan selisih 84,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berikut adalah hasil uji kelayakan model atau uji F yang disajikan didalam tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,088	7	,013	4,303	,000 ^b
Residual	,474	162	,003		
Total	,562	169			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DBH, PE, PAD*PE, DAU*PE DBH*PE

Sumber: data sekunder diolah 2023.

Berdasarkan Tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil output SPSS mendapatkan nilai dari uji t yang disajikan pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Model	Standardized Coefficients		Sig.	t	Keterangan
	Beta				
1 (Constant)				9,184	
PAD	-,166		,118	-1,570	H ₁ ditolak
DAU	-,243		,006	-2,769	H ₂ ditolak
DBH	,151		,032	1,427	H ₃ diterima
PE	,445		,022	,406	H ₄ diterima
PAD*PE	,430		,019	1,294	H ₅ diterima
DAU*PE	,214		,012	,260	H ₆ diterima
DBH*PE	,044		,030	,257	H ₇ diterima

Dependent Variable: BM
Sumber: data sekunder diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa (PAD) Terhadap (BM) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,118 > 0,05, sehingga H₁ ditolak, karena PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh (DAU) Terhadap (BM) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006 > 0,05 sehingga H₂ ditolak, karena DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Pengaruh (DBH) Terhadap (BM) nilai signifikansi sebesar 0,032 < 0,05 sehingga H₃ diterima, karena DBH memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pengaruh (PE) Terhadap (BM) nilai signifikansi sebesar 0,022 < 0,05 sehingga H₄ diterima, karena PE memiliki pengaruh positif terhadap BM. Pengaruh (PAD*PE) Terhadap (BM) nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05 sehingga H₅ diterima, karena PE mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap BM. Pengaruh (DAU*PE) Terhadap (BM) nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,05 sehingga H₆ diterima, karena Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pengaruh (DBH*PE) Terhadap (BM) nilai signifikansi sebesar 0,030 < 0,05 sehingga H₇ diterima, karena PE mampu memoderasi pengaruh DBH terhadap BM.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai Uji T signifikan sebesar 0,118 kurang dari 0,05 (0,118 > 0,05) dan MRA koefisien regresi sebesar -0,087 (menunjukkan nilai negatif). Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena anggaran PAD dialokasikan untuk biaya pemeliharaan rutin belum maksimal sehingga pada saat pemerintah daerah menambah pengadaan aset tetap dan aset lainnya guna melakukan pembangunan daerah melalui alokasi belanja modal, maka akan berdampak pada berkurangnya PAD karena beban biaya pemeliharaan rutin semakin bertambah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh

Pramudya dan Abdullah (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini juga sejalan dengan Budiarti (2014) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai Uji T signifikan sebesar 0,006 kurang dari 0,05 ($0,006 > 0,05$) dan MRA koefisien regresi sebesar -0,114 (menunjukkan nilai negatif). Hal ini menunjukkan bahwa DAU merupakan dana transfer yang bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan pun tidak terlalu besar sehingga tidak dapat memberikan dampak yang baik terhadap pengalokasian belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Styaningrum (2020) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Melgiana *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai Uji T signifikan sebesar 0,032 kurang dari 0,05 ($0,032 < 0,05$) dan MRA koefisien regresi sebesar 0,127 (menunjukkan nilai positif). Hasil di atas menandakan bahwa Dana Bagi Hasil mampu mengolah dana yang ada, namun belum maksimal hasilnya sehingga diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama khususnya daerah itu sendiri, secara teoritis. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016), Salama (2018), Santoso *et al.* (2021), serta Prasetyo dan Rusdi (2021) menyatakan hasil bahwa Dana Bagi Hasil memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai Uji T signifikan sebesar 0,022 kurang dari 0,05 ($0,022 < 0,05$) dan MRA koefisien regresi sebesar 0,127 (menunjukkan nilai positif). Hal ini merujuk pada Belanja Modal sebagai bentuk penunjang perekonomian dengan pengembangan infrastruktur daerah, sehingga berdampak pada tingkat produktif masyarakat yang mana nantinya akan menambah pendapatan per kapita pada suatu daerah. Peningkatan pada PE dapat memberikan peluang kepada daerah, dimana adanya calon investor yang ingin menanamkan modalnya pada daerah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Masruroh (2018), Ayem dan Pratama (2018), serta Sari dan Hermanto (2018) memberikan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Mmederasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai Uji T signifikan sebesar 0,019 kurang dari 0,05 ($0,019 < 0,05$) dan MRA koefisien regresi sebesar 1,256 (menunjukkan nilai positif). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. hal ini mengakibatkan tingkat konsumsi dan produktivitas di beberapa kota/kabupaten menyebar secara merata, sehingga semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah. Dampak ini akan terasa pada penerimaan daerah yang semakin meningkat. Penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Masruroh (2018), Mahardika dan Riharjo (2019), serta Soesilo dan Asyik (2021) memberikan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai Uji T signifikan sebesar 0,012 kurang dari 0,05 ($0,012 < 0,05$) dan MRA koefisien regresi sebesar 0,267 (menunjukkan nilai positif). Dana Alokasi Umum (DAU) tujuan agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antar daerah dengan menerapkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi pada suatu daerah, sehingga pemerintah berharap supaya terjadi keseimbangan perekonomian antar daerah karena tersedianya infrastruktur yang memadai. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2012) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dibuktikan dengan nilai Uji T signifikan sebesar 0,030 kurang dari 0,05 ($0,030 < 0,05$) dan MRA koefisien regresi sebesar 0,236 (menunjukkan nilai positif). Hal ini berarti bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan daerah yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (*by origin*) dan berpotensi menjadi salah satu modal utama daerah dalam memperoleh dana pembangunan yang nantinya akan dialokasikan untuk belanja daerah dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil serta sebagai penunjang dalam pembangunan daerah yang berguna dalam hal memberikan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan yang baik kepada publik. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Prabawati dan Wany (2017), Salama (2018), serta Cahyaning (2018) memberikan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, (3) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (4) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (5) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (6) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (7) Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap objek lain dan memperbanyak responden sehingga dapat menggambarkan secara utuh pengaruh yang ada. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan faktor-faktor yang lebih bisa mendeskripsikan pengaruh terhadap belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, FX. 2010. Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2)
- Ayem, A. dan D. D. Pratama. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara* 2(2).
- Budiarti, P. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Struktur Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi* 12(1).
- Damanik, C. T. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Dini, S. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 3(1): 77-92.
- Donaldson, L., dan Davis, J.H. 1991. Stewardship Theory Or Agency Theory, CEO Governance And Shareholder Returns, *Australian Journal Of Management*, 16, 49-46.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. IX. Badan Penerbit-Undip. Semarang.
- Hikmah, A. W. 2019. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Luas Wilayah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Widya Dharma. Klaten.
- Hidayati, N. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hutabarat, D. D., W. Winarno, dan R. Diananto. 2021. Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Heliyanto, Firnandi. 2015. Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur. STIESIA. Retrieved from file:///C:/Users/X441U/Downloads/Documents/7874-30724-1-PB.
- Jaya, I Putu N.P.K; Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92.
- Jannah Roihatul dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, *Jurnal* 7(17). Prodi Manajemen, FE- Universitas Islam Malang.
- Jaeni, dan L Anggana, G. 2016. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Bantuan Provinsi Terhadap Belanja Modal. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(1), 13-26.
- Masruroh, A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *Simki-Economic* 02(01): 02-15.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Marryadi, 2014. Pengaruh PAD, DAU, DBH, SiLPA, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

- Mahardika, S. A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(11): 1-16.
- Mulyati, O. D. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020. *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.*
- Mentayani, I. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi* 9(2): 91-102
- Mochlas dan D. I. Purwati. 2019. Memoderasikah Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal? (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *STABILITY: Journal of Management & Business* 2(1): 1-19.
- Melgiana, A. C., I. W. Rupa, dan N. P. Riasning. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 1(1): 45-49.
- Nuzana, M. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(10).
- Purwanto, Fiona Puspita Devi. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011). *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Permatasari, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5(1): 1-17.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 09 Desember 2005. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578. Jakarta.
- Pramudya, F. K. dan M. F. Abdullah. 2021. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, Terhadap Belanja Modal. *INOVASI* 17(4): 653-660.
- Prabawati, P. S. S. dan Wany, E. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilibrium*: 01-17.
- Prasetyo, D. A. dan D. Rusdi. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5: 48-75.
- Priambudi, W. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Timur. *Jurnal Nominal* 6(1).
- Rinaldi, Mikhral. 2017. Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional dan Variabel Makro Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1): 49-60.
- Santoso, F. S., S. Bantasyam, dan S. B. Astuti. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *JlAP* 1(2): 94-105.
- Sari, I. N. dan S. W. Hermanto. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(12): 1-19.
- Salama, S. C. U. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 3(1): 20-38.

- Sujarweni, V. W. 2018. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. *Pustaka Baru Press*. Yogyakarta.
- Susanti, S. dan H. Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana ALokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *JIMEKA* 1(1): 183-191.
- Sugiarthi, N. P., & Supadmi, N. L. 2014. Pengaruh PAD, DAU, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Soesilo, A. F. dan N. F. Asyik. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, dan Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(4): 1-21.
- Soekirno, S. 2011 *Makro Ekonomi Modern*. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Styaningrum, R. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi. *Skripsi*. Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Yuliantoni, S. dan Arza, F. I. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015- 2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 3(1): 170-187.